



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019**

KECAMATAN PEMALANG

Jalan DI Panjaitan No. 205 Pemalang Telp. (0284) 321004 Kode pos 52353

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pemalang tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Kecamatan Pemalang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan visi dan misi Kecamatan Pemalang yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu :“Kecamatan Pemalang menjadi pusat pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa”. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pemalang Tahun 2019 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2019. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Februari 2020

CAMAT PEMALANG



SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671213 199803 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Pemalang sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga Kecamatan Pemalang dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kecamatan Pemalang, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

LKjIP Tahun 2019 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Pemalang Tahun 2016-2021 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui pernyataan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategi. Pencaapaian 3 sasaran strategis ini tercermin dalam indikator kinerja beserta target dan realisasinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja 3 sasaran strategis tersebut dari target yang ditetapkan sebelumnya secara rincian seluruh sasaran adalah sebagai berikut

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	CC	Belum dievaluasi	Belum dievaluasi
	Prosentase penyerapan anggaran	98	99,19	101%
	Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan	99,71	100	103%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	84	77	91,67%

desa binaan.				
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Nilai SKM	80	83,36	104%
	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat.	97,5	100	103%
	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik.	94	100	108%
	Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik	100	100	100%

Melihat hasil analisis capaian kinerja Kecamatan Pemalang yang menunjukkan bahwa tingkat pencapaian rata-rata dari realisasi indikator kinerja bila dibandingkan dengan target masing-masing indikator kinerja pada sasaran (1) meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 102% dan sasaran (3) yaitu meningkatnya kualitas Pelayanan publik sebesar 104%. Sedangkan pencapaian sasaran (2) meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan tercapai 91,67%. Atas dasar pencapaian 3 sasaran strategis tersebut Kecamatan Pemalang masuk kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Kecamatan Pemalang tahun 2019 tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan pencapaian kinerja terutama indikator kinerja yang belum memenuhi target pada sasaran (2) untuk meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan, dengan upaya antara lain :

1. Pemenuhan SDM yang mempunyai kapasitas yang dibutuhkan.
2. Pembinaan dan pemantauan desa binaan yang kurang administrasinya secara kontinue.
3. Pembuatan jadwal sesuai kebutuhan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tertib administrasi keuangan dan pemerintahan desa.
4. Adanya penekanan terhadap desa/kelurahan yang kurang tertib administrasinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Gambaran Umum	5
i. Struktur Organisasi	5
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	8
B Isu Strategis	9
C Keuangan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A Perencanaan Strategis	12
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
ii. Strategi dan Arah Kebijakan	16
B Perjanjian Kinerja	18
C Rencana Anggaran	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A Capaian Kinerja Organisasi	22
i. Capaian Pengukuran Kinerja Organisasi	22
ii. Capaian Indikator Kinerja Utama	24
iii. Analisis Capaian Kinerja	25
B Akuntabilitas Anggaran	31
C Inovasi	43
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	46
LAMPIRAN	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Pemalang	
3) Hasil Pelayanan di Kecamatan Pemalang	
4) Inovasi Pelayanan di Kecamatan Pemalang	

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

i. Struktur Organisasi

Kecamatan Pemalang ditetapkan penataan organisasinya dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No.72 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi Kecamatan dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. KECAMATAN

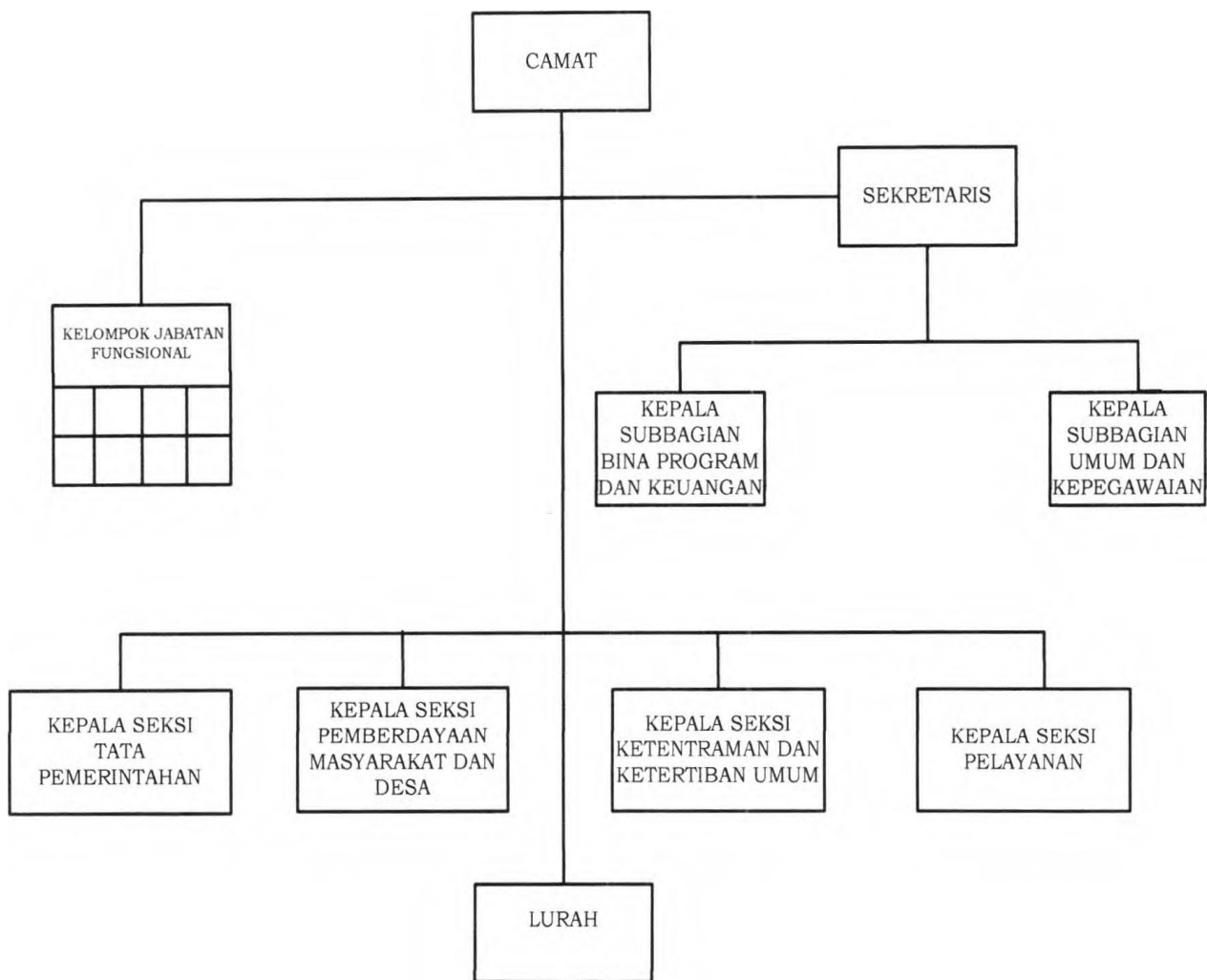
- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi PMD
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. KELURAHAN

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Ekonomi Pemb. Dan Kesejahteraan Sosial
- e. Ketentraman Dan Ketertiban

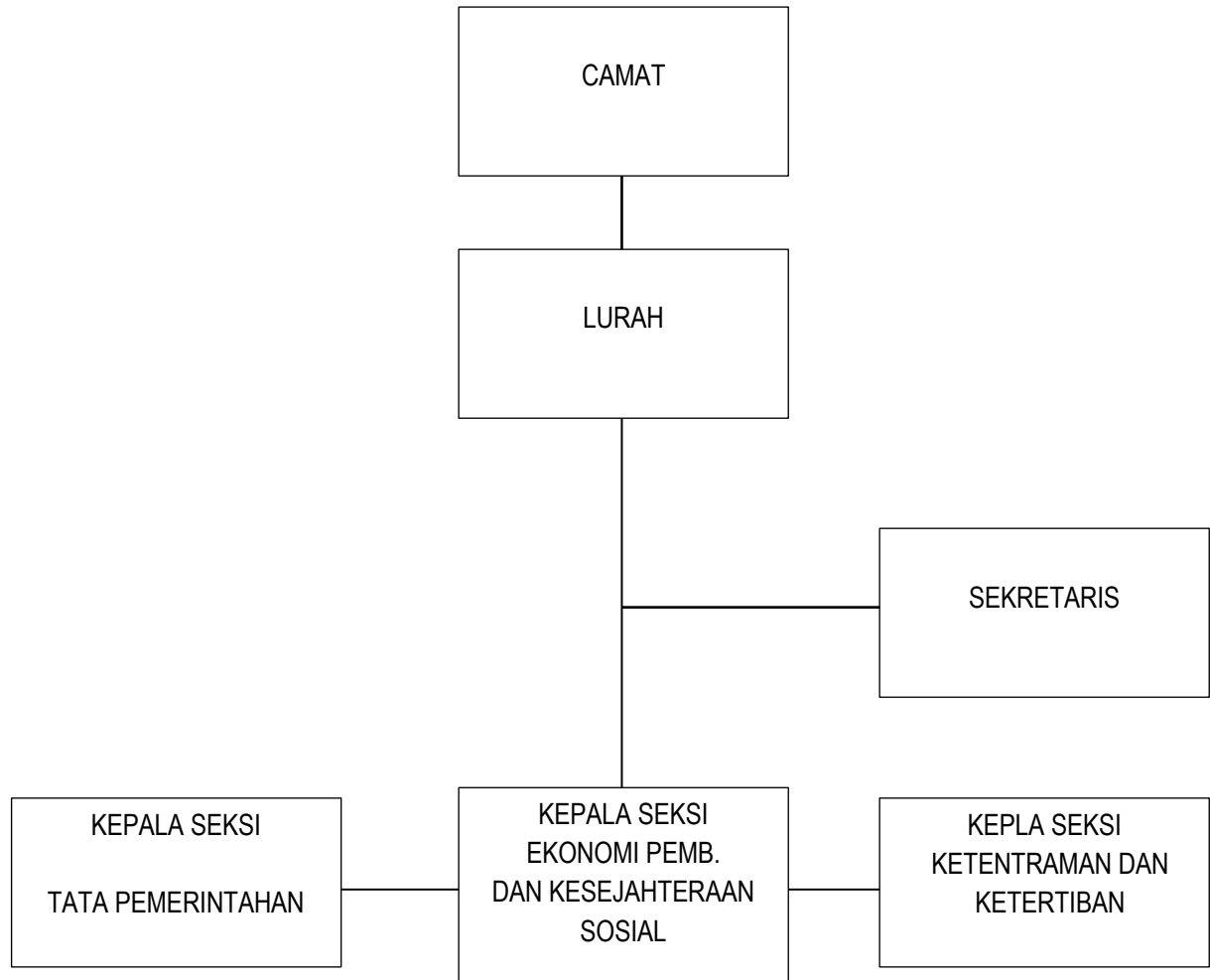
Adapun struktur organisasi Kecamatan Pemasang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PEMALANG



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

KECAMATAN PEMALANG



ii. Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Pemalang No 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang..

Tugas pokok Kecamatan Pemalang selaku OPD adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain tugas pokok, tugas lainnya adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- d. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Adapun fungsi Kecamatan Pemalang sebagai OPD meliputi :

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

B. ISU STRATEGIS

Dalam penentuan strategi, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang juga tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 antara lain :

- 1) Pengembangan kapasitas, kualitas dan etos kerja aparatur;
- 2) pengembangan dan penerapan regulasi secara konsisten dan menyeluruh;
- 3) Penerapan SPP, Maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat di prioritaskan kepada PD yang melakukan pelayanan publik.
- 4) Pembangunan titik hotspot di kawasan fasilitas umum kecamatan.

Kecamatan Pemalang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Sedangkan fungsi OPD Kecamatan Pemalang antara lain :

- 1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan Administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup kerjanya.

Dalam perumusan untuk menentukan dan mengidentifikasi isu-isu penting perlu adanya kecermatan dan ketepatan dalam perumusannya sehingga dapat menentukan permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta mengetahui akan tantangan dan peluang yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam rangka untuk peningkatan pelayanan OPD.

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat, secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam renstra Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 Isu strategis permasalahan dan hambatan yang dapat diidentifikasi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
- d. Belum optimalnya data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
- e. Masih lemahnya pendataan dan data kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dan kelurahan;
- f. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;

- g. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;

C. KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2019 Kecamatan Pemalang melalui APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan mendapat alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 23.059.729.000,- dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.130.755.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 14.928.974.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam 1 (satu) urusan yaitu unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kecamatan, meliputi 6 (enam) program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung..

Pada anggaran Belanja Langsung tersebut terdapat alokasi Dana Kelurahan yang masuk dalam 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kewilyahan dan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing 7 kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing 7 kelurahan. Jumlah alokasi anggaran dana kelurahan sebesar Rp. 9.312.132.000,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.721,166.000,- dan bersumber dari DAU Tambahan sebesar Rp. 2.590.966.000,-

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 050/01/TAHUN 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Pemalang Tahun 2016-2021. Tahun 2019 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, guna mewujudkan apa yang di cita-citakan yaitu menuju **Kabupaten Pemalang hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera**. Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang masih menemukan beberapa tantangan dan juga peluang yang dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Terwujudnya Pemalang hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diangankan menjadi nyata. Pemalang hebat merupakan ultimate goal yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi tagline pembangunan daerah dalam mengacu semangat, percepatan dan sinergitas para stakeholders terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis local wisdom/ local value dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotongroyong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian masyarakat.

Rencana strategis Kecamatan Pemalang Tahun 2016– 2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui pernyataan kinerja sasaran strategis. Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam Tahun 2016-2021 mempunyai Sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah,
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan,
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang memiliki 8 indikator kinerja utama, yang seluruhnya tercantum dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.1.sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran OPD Kecamatan Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi AKIP yang di peroleh
			Prosentase penyerapan anggaran
			Prosentase partisipasi Masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan
2.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
			Prosentase penanganan pengaduan masyarakat
			Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di fasilitasi dengan baik

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Indikator Kinerjanya dapat dilihat di tabel 2.2 :

Tabel 2.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Penjelasan
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai evaluasi AKIP	Diukur melalui nilai LKJIP yang diperoleh
	2. Prosentase penyerapan anggaran	= $\frac{\text{Jumlah anggaran yang terserap}}{\text{Jumlah anggaran}} \times 100$
	3. Prosentase partisipasi Masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan	= $\frac{\text{Jumlah lembaga dan tokoh masy. yg berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan}}{\text{Jumlah lembaga dan Tomas yg ada dalam Kelurahan}} \times 100$
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.	Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan	= $\frac{\text{Jumlah desa yang Lengkap administrasinya}}{\text{Jumlah desa binaan}} \times 100$
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	= Nilai SKM yang diperoleh
	2. Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	= $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat Yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat Yang disampaikan}} \times 100$
	3. Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	= $\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100$
	4. Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di fasilitasi dengan baik	= $\frac{\text{Jumlah PMKS yg difasilitasi dgn baik dan layak}}{\text{Jumlah PMKS Seluruhnya}} \times 100$

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
SASARAN DAN PROGRAM
KECAMATAN PEMALANG

No.	Sasaran	Program
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 5. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 6. Program pengembangan kewilayahan
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 4. Program pengembangan kewilayahan

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan.

Strategi dan kebijakan yang mengacu pada Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang sesuai tugas dan fungsi PD.

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Secara konstruksi teroris dilakukan dengan Metode SWOT (*Strenght, Weakness, Oppotunities, and Threath*), dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi serta dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang sebagaimana tersebut dalam tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD maka dapat diambil strategi yang tepat untuk lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Dari analisis tersebut diatas strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan capaian kinerja pemerintah melalui peningkatan kapasitas aparatur
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasits aparatur
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP/SPP, Maklumat pelayanan secara konsisten dan menyeluruh

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, maka kebijakan yang ditempuh Kecamatan Pemalang yaitu :

1. Penyusunan berbagai perencanaan dan laporan capaian kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada desa dan masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan, optimalisasi, pengembangan dan penerapan SOP/SPP, maklumat pelayanan secara konsisten

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan PD Kecamatan Pemalang dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan nilai LKjIP dan peningkatan penyerapan anggaran	Peningkatan nilai LKjIP dan penyerapan anggaran
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Meningkatkan sumber daya aparatur	Mengoptimalkan sumber daya aparatur
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat	Peningkatan, kapasitas aparatur pelayanan dan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja 2019 Kecamatan Pemalang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja dengan targetnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN PEMALANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	CC
		Prosentase penyerapan anggaran	%	98
		Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang kelurahan	%	99,71
		- Kelurahan Widuri	%	100
		- Kelurahan Pelutan	%	100
		- Kelurahan Kebondalem	%	100
		- Kelurahan Bojongbata	%	98
		- Kelurahan Mulyoharjo	%	100
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	84
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Skor	80
		Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	94
		Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	97,5
		Prosentase penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak	%	100
		- Kelurahan Widuri	%	100
- Kelurahan Pelutan	%	100		

	- Kelurahan Kebondalem	%	97
	- Kelurahan Bojongbata	%	100
	- Kelurahan Mulyoharjo	%	100
	- Kelurahan Paduraksa	%	64
	- Kelurahan Sugihwaras	%	100

C. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 12.454.987.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.093.040.000,- dan Belanja Langsung Rp. 4.361.947.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi sebesar Rp. 13.747.597.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.130.755.000,- dan Belanja Langsung Rp. 5.616.842.000,-

Adapun target belanja langsung Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
TARGET BELANJA LANGSUNG APBD PERUBAHAN TAHUN 2019
KECAMATAN PEMALANG

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	375.812.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	624.600.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	67.025.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	83.500.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	4.465.905.000,00	APBD
6	Program Pengembangan Kewilayahan	9.312.132.000,00	APBD & DAU Tambahan
	Jumlah	14.928.974.000,00	

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintahan Daerah	14.928.974.000	100	Didukung oleh 6 (enam) program : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 5. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 6. Program pengembangan kewilayahan
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya	272.635.000	1,83	Didukung oleh 1 (satu) program: 1. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.849.913.000	25,79	Didukung oleh 2 (dua) program: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

i. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Organisasi

Sesuai dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pemalang adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pemalang Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Capaian Indikator Kinerja Utama, penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan bentuk outcome.

Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh Organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Pemalang melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel

3.1

KATEGORI PENILAIAN HASIL EVALUASI

NO	KATEGORI	SKOR	Kategori
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan,
3	BB	>70-80	Sangat Baik,
4	B	>60-70	Baik,
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai),
6	C	>30-50	Kurang,
7	D	0-30	Sangat Kurang,

ii. Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Dari 3 sasaran dengan indikator kinerja Utama sebanyak 8 indikator, capaian perjanjian kinerja perubahan Kecamatan Pemalang dapat dilihat di tabel 3.2. adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2019			Target Renstra 2021	% Renstra 2021
		2016	2017	2018	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	D	D	Belum dievaluasi	CC	Belum di evaluasi	Belum tercapai	B	Belum tercapai
	Prosentase penyerapan anggaran	99,34	98,56	98,68	98	99,19	101%	98%	100
	Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan	99,34	99,43	100	99,71	100	103%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	70	76	76	84	77	91,67 %	84%	90,47
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Nilai SKM	Na	78,95	83,75	80	83,36	104%	84%	84
	Prosentase penanganan pengaduan	95	96	97	97,5	100	103%	97,5%	98

	masyarakat.								
	Prosentase meningkat nya kualitas pelayanan publik.	91	92	93	93	100	108%	94%	94
	Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik	80,86	91,71	95	100	100	100%	100%	100

iii. Analisis Capaian Kinerja

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah terdiri dari :

Tabel 3.3

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2019			Target Renstra 2021	% Renstra 2021
		2016	2017	2018	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	D	D	Belum dievaluasi	CC	Belum dievaluasi	Belum tercapai	B	Belum tercapai
	Prosentase penyerapan anggaran	99,34	98,56	98,68	98	99,19	101%	98%	100
	Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan	99,34	99,43	100	99,71	100	103%	100%	100%
Prosentase rata-rata capaian kinerja							102%		

Sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah yang mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh, prosentase penyerapan anggaran dan Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan menunjukkan bahwa :

- a. Perolehan Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh tahun 2016 dan 2017 kategori D, Tahun 2017 mendapat nilai 18,57 merupakan hasil penilaian AKIP 2016. Realisasi AKIP tahun 2018 yang merupakan hasil penilaian AKIP tahun 2017 dan realisasi AKIP pada tahun 2019 yang merupakan hasil penilaian AKIP tahun 2018 belum dievaluasi sehingga belum bisa diketahui hasilnya. masih dalam proses evaluasi.
- b. Prosentase penyerapan anggaran merupakan rasio dari jumlah penyerapan anggaran dibandingkan jumlah anggaran dikalikan 100% adalah kemampuan OPD dalam mengelola dan melaksanakan program/kegiatan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Penyerapan anggaran kegiatan tahun 2016 terealisasi 99,34% dan untuk tahun 2017 tercapai 98,56% serta tahun 2018 terealisasi sebesar 98,68%. Sedangkan pada tahun 2018 OPD Kecamatan Pemalang untuk realisasi prosentase penyerapan anggaran kegiatan Kecamatan Pemalang dapat mencapai hasil yang sangat memuaskan sebesar 99,19% dari targetnya sebesar 98%.
- c. Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan mencapai 100% dari target 99,71%. Di hasilkan dari rata-rata pencapaian partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan di 7 kelurahan

Pelaksanaan kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah didukung 6 (enam) program yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program pemingkatan sistem palaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
5. Program pengembangan kewilayahan

Permasalahan yang dihadapi:

- SOTK Kecamatan Pemalang mengalami penambahan unit baru yaitu posisi Kelurahan yang membawa dampak pada perencanaan pembangunan daerah yang semakin kompleks di tingkat Kecamatan Pemalang dengan masuknya 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Kebondalem, Bojongbata, Paduraksa, Widuri, Pelutan, Mulyoharjo, Sugihwaras.
- Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran alokasi dana kelurahan yang dilakukan dalam waktu singkat mengakibatkan perencanaan yang dihasilkan kurang optimal
- Kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana kelurahan baik secara teknis maupun administratif sehingga timbul kebingungan dalam proses pelaksanaannya.
- Belum tercantumnya kewenangan yang diampu kecamatan baik kewenangan atributif, dan delegatif dalam dokumen perencanaan daerah pasca di tetapkannya SOTK baru.

Solusi yang dilakukan

- Ketersediaan SDM dan alokasi anggaran yang memadai
- Peningkatan kapasitas SDM Aparatur secara rutin
- Koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait perencanaan pembangunan wilayah di lokasi terkait.
- Adanya bimbingan atau pembinaan teknis dan administratif pengelolaan dana kelurahan. Selain itu perlu adanya tenaga pendamping di tiap kelurahan untuk bisa membantu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dana kelurahan
- Terkait nama program dan kegiatan seharusnya pada 2 kewenangan itu tercantum pada dokumen perencanaan daerah.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan sebagai berikut :

Tabel 3.4

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2019			Target Renstra 2021	% Renstra 2021
		2016	2017	2018	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Prosentase kelembagaan administrasi		76	76	84	77	91,67 %	84%	90,47

dan sumber daya aparatur desa binaan.	desa binaan	70							
Prosentase rata-rata capaian kinerja							91,67 %		

Indikator kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur desa binaan adalah didapat dari prosentase kelembagaan administrasi desa binaan merupakan jumlah desa yang lengkap administrasinya dibandingkan jumlah desa binaan dikalikan 100% . Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja aparatur kecamatan dalam membina administrasi desa. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 rata-rata capaian indikator ini masih sama yaitu 73% dan 76% menunjukkan bahwa dari 13 desa yang ada di kecamatan pemalang terdapat 9 desa yang administrasinya cukup lengkap. Pada tahun 2018 ada kenaikan tercapai 76% sesuai target dimana sudah 10 desa yang dapat menunjukkan administrasinya tercukupi dengan baik dan cukup lengkap. Namun pada tahun 2019 dengan target 84% belum bisa terpenuhi karena baru tercapai 77% didalamnya terdapat 10 desa yang cukup baik dan lengkap administrasinya sementara masih ada 3 desa yang masih kurang lengkap dan tertib.

Pelaksanaan kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur desa binaan ini didukung program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

Capaian indikator dari sasaran kedua tersebut belum bisa memenuhi target karena disebabkan masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa yang dipengaruhi oleh faktor kurangnya SDM yang memadai dan pembinaan yang kurang terjadwal dimana 3 hal tersebut yang menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi. Sedangkan solusi yang bisa dilakukan kedepan yaitu :

- Pembinaan dan pemantauan terhadap desa binaan yang kurang tertib/lengkap administrasinya perlu dilakukan secara continue.
- Dibuatkan jadwal sesuai kebutuhan dan kelonggaran waktu SDM yang akan memonev dan mengevaluasi
- Penekanan terhadap desa / kelurahan yang kurang tertib administrasinya.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel 3.5
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2019			Target Renstra 2021	% Renstra 2021
		2016	2017	2018	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Nilai SKM	Na	78,95	83,75	80	83,36	104%	84%	84
	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat.	95	96	97	97,5	100	103%	97,5%	98
	Prosentase meningkat nya kualitas pelayanan publik.	91	92	93	93	100	108%	94%	94
	Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik	80,86	91,71	95	100	100	100%	100%	100
Posentase rata-rata capaian kinerja							105%		

Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik terdapat 4 indikator kinerja meliputi :

- a. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dimulai pada tahun 2017 dengan mendapat skor 78,95 kemudian pada tahun 2018 meningkat sangat memuaskan dan mendapat skor 83,75, demikian pula pada tahun 2019 memperoleh skor 83,36 walaupun turun 0,39 namun masih memuaskan. Nilai ini di dapat dari pembagian angket kepada masyarakat untuk menilai sedcara obyektif. Dan dilakukan pengambilan responden sebanyak 100 responden.

- b. Prosentase penanganan pengaduan masyarakat yang didapat dari jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani dibandingkan jumlah pengaduan masyarakat yang tersampaikan dikalikan 100%. Rasio ini digunakan untuk melihat kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat yang tersampaikan apakah dapat tertangani semua atau tidak. Capaian rasio ini pada tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 dan tahun 2018 tercapai sebesar 100% . Penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2019 juga tercapai 100% karena dengan adanya 4 buah pengaduan masyarakat yang masuk dalam tahun 2019 dapat tertangani semua dengan baik.
- c. Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diperoleh dari jumlah pelayanan yang terselesaikan dengan tepat waktu dibandingkan jumlah pelayanan yang ada dikalikan 100%, rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kualitas pelayanan yang disajikan oleh Kecamatan Pemalang kepada masyarakat. Capaian pelayanan yang dapat terselesaikan dengan tepat waktu pada tahun 2016 sebesar 91%, tahun 2017 sebesar 92% dan tahun 2018 semakin baik tercapai 93%, demikian pula pada tahun 2019 meningkat teralisasi 100% dari target 94%, artinya semua pelayanan dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terlambat.
- d. Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik di 7 (tujuh) kelurahan. Pada tahun 2016 rata-rata di 7 kelurahan dapat terselesaikan 80,86%, tahun 2017 meningkat menjadi 91,71 dan tahun 2018 naik menjadi 95%. Sedangkan pada tahun 2019 mendapat predikat sangat memuaskan karena dari target 100% dapat terealisasi 100%. Di ambil dari jumlah realisasi 7 (tujuh) kelurahan di bagi 7.

Pelaksanaan kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung 2 (dua) program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

Permasalahan yang di hadapi :

- Prosentase kualitas pelayanan publik kurang maksimal, karena kurang SDM yang kurang menguasai IT.

- Belum adanya upaya pelayanan secara online yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasinya
- Penanganan pengaduan masyarakat kurang maksimal karena belum berfungsinya SMS center Kecamatan secara maksimal.

Solusi yang dilakukan :

- Menambah petugas yang menguasai IT/Laptop untuk bisa membuat aplikasi pelayanan publik.
- Mengoptimalkan SMS Center kecamatan agar penanganan pengaduan masyarakat segera tertangani dengan cepat dan tepat.

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

i. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2019 Kecamatan Pemalang melalui APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 23.059.729.000,- dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.130.755.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 14.928.974.000,- yang dijabarkan dalam 1 (satu) urusan yaitu unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kecamatan, meliputi 6 (enam) program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp.22.433.066.320,- atau sebesar 97,28%, dengan rincian belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 7.624.404.459,- atau sebesar 93,77% dan belanja langsung sebesar Rp. 14.808.661.861,- atau 99,19% , dengan rincian tabel di bawah ini :

**TABEL 3.6
PENYERAPAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA**

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Tidak Langsung	8.130.755.000,-	7.624.404.459,-	506.350.541,-	93,77
2.	Belanja Langsung	14.928.974.000,-	14.808.661.861,-	120.312.139,-	99,19
	Jumlah	23.059.729.000,-	22.433.066.320,-	626.662.680,-	97,28

Pada Tahun 2019 di bulan April Kecamatan Pemalang yang mempunyai 7 Kelurahan mendapat alokasi dana Kelurahan termasuk dalam belanja langsung dan di alokasikan kedalam program pengembangan Kewilyahan sebesar Rp. 9.312.132.000,- dan terealisasi Rp.9.279.473.626,- atau 99,65%. yang terdiri dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan sebesar Rp. 7.418.806.459,- yang terealisasi sebesar Rp. 7.405.588.745,- atau 99,82% dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan anggaran Rp.1.893.325.541,- terealisasi Rp.1.873.884.881,- atau 98,97% dan dapat dirinci pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.7
PENYERAPAN ANGGARAN DANA KELURAHAN

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Program Pengembangan Kewilyahan	9.312.132.000	9.279.473.626	32.658.374	99,65
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	7.418.806.459	7.405.588.745	13.317.714	99,82
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.893.325.541	1.873.884.881	19.440.660	98,97

Dibawah ini disampaikan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL 3.8
PENYERAPAN ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2019

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	% Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	375.812.000	362.891.946	12.920.054	96,56
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	624.600.000	621.915.339	2.684.661	99,57
3	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	67.025.000	66.935.000	90.000	99,87
4	Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran	83.500.000	81.992.000	1.508.000	98,19

	SKPD				
5	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	4.465.905.000	4.395.453.950	70.451.050	98,42
6	Program Pengembangan Kewilayahan	9.312.132.000	9.279.473.626	32.658.374	99,65
	Total Anggaran	14.928.974.000	14.808.661.861	120.312.139	99,19

Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Pemalang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini :

TABEL 3.9
REALISASI BELANJA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

No.	Belanja	Tahun Anggaran 2018		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Operasi	15.591.147.774,-	14.987.649.497,-	96,13
2.	Belanja Modal	7.468.581.226,-	7.445.416.823,-	99,69
	Jumlah Belanja	23.059.729.000,-	22.433.066.320,-	97,38

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 Rp.22.433.066.320,- atau 97,38% dari anggaran sebesar Rp.23.059.729.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.626.662.680,-, atau 2,72%.

Belanja Operasi Kecamatan Pemalang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

TABEL 3.10
REALISASI BELANJA OPERASI

No.	Belanja Operasi	Tahun Anggaran 2018		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai			
	Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	8.130.755.000,-	7.624.404.459,-	93,77
	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	755.401.500,-	738.079.000,-	97,71
2.	Belanja Barang/Jasa	6.061.746.274,-	5.983.428.838,-	98,81
3.	Belanja Hibah	643.245.000,-	641.737.200,-	99,77
	Jumlah Belanja Operasi	15.591.147.774,-	14.987.649.497,-	96,13

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.14.987.649.497,- atau 96,13% dari anggaran Rp.15.591.147.774,- dan sisa belanja operasi tahun 2019 sebesar Rp. 603.498.277,- atau 3,87%.

Belanja Modal Kecamatan Pemalang meliputi Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin berupa, pengadaan alat bantu yaitu pengadaan electric generating set kelurahan bojongbata, dan mulyoharjo, Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, pengadaan mebeleur, pengadaan personal komputer dan Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan berupa pengadaan bangunan parkir, rehab pagar pembatas keliling lingkungan kantor, rehabilitasi berat gedung kantor kecamatan pemalang, serta belanja modal terkait adanya dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019. dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

TABEL 3.11
REALISASI BELANJA MODAL KECAMATAN PEMALANG

Belanja Modal	Tahun Anggaran 2019		%
	Anggaran	Realisasi	
BM peralatan dan mesin – pengadaan alat-alat bantu	75.450.000	71.268.182	94,45
BM peralatan dan mesin – pengadaan alat angkutan darat bermotor	31.350.000	30.530.000	97,38
BM peralatan dan mesin – pengadaan alat kantor	78.700.000	77.583.818	98,58
BM-Pengadaan alat-alat rumah tangga	72.200.000	71.073.637	98,43
BM peralatan dan mesin – Pengadaan Komputer	204.350.000	196.221.216	96,02
BM peralatan dan mesin-pengadaan meja dan kursi	43.100.000	42.500.000	98,61
BM Gedung dan Bangunan- pengadaan bangunan gedung kantor	1.345.555.200	1.344.342.099	99,90
BM Gedung dan Bangunan- pengadaan bangunan bersejarah	54.695.000	54.555.500	99,74
BM Gedung dan Bangunan- pengadaan bangunan rambu-rambu	60.000.000	60.000.000	100,00
BM Jalan, irigasi, dan jaringan-pengadaan jalan	4.828.908.026	4.823.070.871	99,88
BM Jalan, irigasi, dan jaringan-pengadaan jembatan	110.300.000	110.300.000	100,00

BM Jalan, irigasi, dan jaringan-pengadaan Bangunan air kotor	466.173.000	466.171.500	99,99
BM Aset Tetap Lainnya-Pengadaan alat olah raga	9.800.000	9.800.000	100,00
BM Aset Tetap Lainnya-Pegadaan aset tetap Renovasi	88.000.000	88.000.000	100,00
Jumlah	7.468.581.226	7.445.416.823	99,69

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.445.416.823,- atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp 7.468.581.226,-, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 23.164.403,- atau 0,31%. Adapun realisasi anggaran per sasaran strategis sebagaimana tabel 3.12 dibawah ini:

Tabel 3.12
PENYERAPAN ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah	Evaluasi Nilai AKIP	CC	Belum dievaluasi	Blm tercapai	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	57.525.000	57.435.000	99,84
						- penyusunan lap. keuangan akhir tahun	9.500.000	9.500.000	100,00
						- Penyusunan data base SKPD	11.500.000	11.230.000	97,65
						- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	34.000.000	33.029.500	97,15
						- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	32.700.000	32.200.000	98,47
		Prosentase penyerapan anggaran	98%	99,12%	101%	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.300.000	19.275.000	99,87
						- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36.868.000	27.274.596	80,47
						- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasioal	5.000.000	3.282.100	65,64
						- Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.600.000	46.589.250	99,98
						- penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	25.000.000	100,00
						- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.280.000	19.280.000	100,00
						- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7.000.000	7.000.000	100,00
						- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3.840.000	3.840.000	100,00
						- Penyediaan makanan dan minuman	135.664.000	132.404.000	97,60
						- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	40.000.000	38.917.000	97,29
			40.260.000	40.050.000	99,48				
			34.000.000	33.993.818	99,98				
			9.500.000	9.500.000	100,00				
					- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.500.000	9.500.000	100,00	

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						- Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	23.100.000	22.700.000	98,27
						- Pengadaan mebeleur	23.000.000	22.222.680	96,62
						- Pengadaan komputer dan kelengkapannya	2.000.000	1.990.000	99,50
						- Pengadaan lemari besi dan filling cabinet	160.000.000	159.950.000	99,97
						- Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	6.000.000	5.927.000	98,78
						- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	219.000.000	218.475.000	99,76
						- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.000.000	28.431.341	98,04
						- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	5.000.000	4.977.500	99,55
						- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	7.000.000	6.798.000	97,11
						- Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya	107.000.000	106.950.000	99,95
						- Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	57.525.000	57.435.000	99,61
						- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	9.500.000	9.500.000	100,00
						- penyusunan lap. keuangan akhir tahun	11.500.000	11.230.000	97,65
						- Penyusunan data base SKPD	34.000.000	33.029.500	97,15
						- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	38.000.000	37.732.500	99,30
						- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	78.500.000	74.887.250	95,40
						- Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan Desa/ Kelurahan	181.635.000	177.119.750	97,51
						- Koordinasi kecamatan , desa dan kelurahan	50.000.000	48.238.500	96,48
						- Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional tingkat kecamatan/kelurahan	12.500.000	12.237.500	97,90

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						- Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	144.590.000	137.108.603	94,83
						- Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala Desa	350.917.000	350.916.200	100,00
						- Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil Musrenbang	32.700.000	32.200.000	98,47
						- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	37.850.000	37.835.000	99,96
						- Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	497.010.000	492.313.352	99,06
						- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	455.775.000	446.739.648	98,02
						- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	682.584.000	677.116.199	99,20
						- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	504.099.000	496.382.890	98,47
						- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	540.154.000	534.048.178	98,87
						- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	485.091.000	478.852.882	98,71
						- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	450.350.000	437.292.998	97,10
						- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	997.151.769	995.206.485	99,80
						- Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Sugihwaras	1.024.971.500	1.024.842.050	99,99
						- Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Widuri	1.105.498.000	1.103.650.340	99,83
						- Pembangunan sarana dan prasarana Kel.	1.027.916.200	1.022.072.887	99,43

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pelutan			
						- Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Kebondalem	1.089.069.490	1.085.810.962	99,70
						- Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Mulyoharjo	1.126.495.000	1.126.352.025	99,99
						- Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Bojongbata	1.047.704.500	1.047.653.996	100,00
						- Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Paduraksa	331.088.231	329.260.092	99,45
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Paduraksa	298.181.500	294.833.500	98,88
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Sugihwaras	231.895.000	231.895.000	100,00
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Sugihwaras	304.517.800	296.811.000	97,47
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Widuri	249.640.510	243.217.700	97,43
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Pelutan	202.630.000	202.630.000	100,00
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Kebondalem	275.372.500	275.237.589	99,95
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Mulyoharjo			99,19
					103%	- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Bojongbata			
						- Pemberdayaan masyarakat di Kel. Paduraksa			
					102%	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan			
	Rata-rata Persentase Realisasi Kinerja	Prosentase partisipasi Masyarakat dan lembaga	9,71%	100%		- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	38.000.000	37.732.500	99,30
						- Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil Musrenbang	698.360.000	698.221.000	99,98

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		masyarakat dalam musrenbang Kelurahan				Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan			99,19
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	84%	77%	91,67%	- Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan Desa/ Kelurahan - Koordinasi kecamatan , desa dan kelurahan - Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	78.500.000 181.635.000 12.500.000 350.917.000	74.887.250 177.119.750 12.237.500 350.916.200	95,40 97,51 97,90 100
	Rata-rata Persentase Realisasi Kinerja				91,67%	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan			96,92
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	80	83,36	104%	- Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	144.590.000	137.108.603	94,83
		Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	97,5	100	103%	- Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) - Pelaksanaan Peringatan hari - hari besar nasional tingkat Kecamatan/Kelurahan	144.590.000 50.000.000	137.108.603 48.238.500	94,83 96,48
		Prosentase penanganan-pengaduan masyarakat	93	100	108%	- Penyediaan jasa keamanan	40.260.000	40.050.000	99,48

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prosentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di fasilitasi dengan baik dan layak	94,43%	100%	106%				
		- Kel. Sugihwaras				- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	497.010.000	492.313.352	99,06
		- Ke. Widuri				- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	455.775.000	446.739.648	98,02
		- Kel. Pelutan				- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	682.584.000	677.116.199	99,20
		- Kel. Kebondalem				- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	504.099.000	496.382.890	98,47
		- Kel. Mulyoharjo				- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	540.154.000	534.048.178	98,87
		- Kel. Bojongbata				- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	485.091.000	478.852.882	98,71
		- Kel. Paduraksa				- Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	450.350.000	437.292.998	97,10
	Rata-rata Persentase Realisasi Kinerja				105%	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan			98,55
	Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2019				99,56	Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2019			98,80

ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja sasaran %	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah	3	102	14.808.661.861	99,19	2,01
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	1	91,67	264.244.500	96,92	(5,25)
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	4	105	3.778.143.250	98,55	6,45
	Prosentase Realisasi Kinerja dan Keuangan		99,56		98,22	1,34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2019, terdapat 2 (dua) sasaran yang telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah dengan prosentase capaian anggaran sebesar 99,19% namun dapat memenuhi capaian kinerja 102% sehingga ada efisiensi sebesar 2,01%
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan prosentase capaian anggaran sebesar 98,55% namun dapat memenuhi capaian kinerja 105% sehingga ada efisiensi sebesar 6,45%

C. INOVASI

Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan di Kecamatan Pemalang untuk mengurangi tumpukan dokumen pengurusan pelayanan perijinan dan non perijinan, maka Kecamatan Pemalang berupaya melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan yang dilakukan secara online. Inovasi pelayanan tersebut adalah pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Online (SIPPOL) dengan konten sementara yaitu :

Kode IP : 182.253.108

Permasalahan yang dihadapi :

1. Berhubung pengadaan aplikasi SIPPOL dianggarkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Pemalang TA 2019 dan pembuatannya selesai dilaksanakan pada awal bulan Desember 2019 maka pelayanan melalui SIPPOL pada tahun 2019 belum bisa dilaksanakan.
2. Belum adanya tenaga khusus yang menangani pelayanan SIPPOL.

Solusi yang dilakukan :

1. Untuk kesiapan penggunaan SIPPOL maka sebelum aplikasi SIPPOL diterapkan telah dilakukan sosialisasi dan bintek SIPPOL pada pertengahan bulan Desember 2019 yang diikuti calon admin SIPPOL dari desa/kelurahan se-Kecamatan Pemalang dan diharapkan SIPPOL bisa segera dilaksanakan pada tahun 2020.
2. Mempersiapkan tenaga/petugas khusus pada pelayanan Kecamatan Pemalang yang melayani SIPPOL yang terlatih.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pemalang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, sasaran strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kecamatan Pemalang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2019 yang menguraikan keberhasilan yang dicapai oleh Kecamatan Pemalang. sebagaimana telah dijelaskan bahwa Kecamatan Pemalang menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis dengan hasil sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah
 - a) Perolehan Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh tahun 2016 dan 2017 kategori D, Tahun 2017 mendapat nilai 18,57. Realisasi AKIP tahun 2018 merupakan hasil penilaian AKIP tahun 2017 dan realisasi AKIP tahun 2019 merupakan hasil penilaian AKIP tahun 2018 belum dievaluasi.
 - b) Prosentase penyerapan anggaran merupakan rasio dari jumlah penyerapan anggaran dibandingkan jumlah anggaran dikalikan 100% adalah kemampuan OPD dalam mengelola dan melaksanakan program/kegiatan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Penyerapan anggaran kegiatan tahun 2016 terealisasi 99,34%, untuk tahun 2017 tercapai 98,56% dan untuk tahun 2018 terealisasi 98,68%. Sedangkan pada tahun 2019 OPD Kecamatan Pemalang untuk realisasi prosentase penyerapan anggaran kegiatan Kecamatan Pemalang sangat memuaskan dapat mencapai 99,19% dari targetnya sebesar 98%.
 - c) Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang Kelurahan mencapai 100% dari target 99,71%. Dihasilkan dari rata-rata pencapaian partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang di 7 kelurahan.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan

Indikator kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatkannya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur desa binaan adalah didapat dari prosentase kelembagaan administrasi desa binaan merupakan jumlah desa yang lengkap administrasinya dibandingkan jumlah desa binaan dikalikan 100% . Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja aparatur kecamatan dalam membina administrasi desa. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 rata-rata capaian indikator ini masih sama sesuai target yaitu 70% dan 76% menunjukkan bahwa dari 13 desa yang ada di kecamatan pemalang terdapat 9 desa yang administrasinya cukup lengkap. Pada tahun 2018 ada kenaikan tercapai 76%. Demikian juga pada tahun 2019 tercapai sebesar 77% masih terdapat 10 desa yang administrasinya tercukupi dengan baik dan cukup lengkap.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- a) Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dimulai pada tahun 2017 dengan mendapat skor 78,95 kemudian pada tahun 2018 meningkat memuaskan dan mendapat skor 83,75, demikian pula pada tahun 2019 memperoleh skor 83,36 walaupun turun 0,39 namun masih dapat mempertahankan predikat memuaskan. Nilai ini di dapat dari pembagian angket kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan dilakukan pengambilan responden sebanyak 100 responden.
- b) Prosentase penanganan pengaduan masyarakat yang didapat dari jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani dibandingkan jumlah pengaduan masyarakat yang tersampaikan dikalikan 100%. Rasio ini digunakan untuk melihat kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat yang tersampaikan apakah dapat tertangani semua atau tidak. Capaian rasio ini pada tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 dan tahun 2018 tercapai sebesar 100% . Penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2019 juga tercapai 100% karena dengan adanya 4 buah pengaduan masyarakat yang masuk dalam tahun 2019 dapat tertangani semua dengan baik.
- c) Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diperoleh dari jumlah pelayanan yang terselesaikan dengan tepat waktu dibandingkan jumlah pelayanan yang ada dikalikan 100%, rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kualitas pelayanan yang disajikan oleh Kecamatan Pemalang kepada masyarakat. Capaian pelayanan yang dapat terselesaikan dengan tepat waktu pada tahun 2016 sebesar 91%, tahun 2017 sebesar 92% dan tahun 2018 semakin baik tercapai 93%, demikian pula pada

tahun 2019 meningkat teralisasi 100% dari target 94%, artinya semua pelayanan dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terlambat.

- d) Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik di 7 (tujuh) kelurahan. Pada tahun 2016 rata-rata di 7 kelurahan dapat terselesaikan 80,86%, tahun 2017 meningkat menjadi 91,71 dan tahun 2018 naik menjadi 95%. Sedangkan pada tahun 2019 mendapat predikat sangat memuaskan karena dari target 100% dapat terealisasi 100%. Di ambil dari jumlah realisasi 7 (tujuh) kelurahan di bagi 7.

B. SARAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja kecamatan pemalang tahun 2019 tersebut, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- Pemenuhan SDM yang mempunyai kapasitas yang dibutuhkan termasuk menambah petugas yang menguasai IT untuk bisa mengelola aplikasi pelayanan public diikuti peningkatan kapasitas aparatur secara rutin.
- Koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait perencanaan pembangunan wilayah di lokasi terkait.
- Disusunnya nama program dan kegiatan pada 2 kewenangan yaitu atributif dan delegatif pada dokumen perencanaan daerah.
- Pembinaan dan pemantauan desa binaan yang kurang administrasinya agar dilaksanakan secara kontinue.
- Dibuatkan jadwal sesuai kebutuhan dan kelonggaran waktu SDM yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- Penekanan terhadap desa / kelurahan yang kurang tertib administrasinya.
- Mengoptimalkan SMS Center kecamatan agar penanganan pengaduan masyarakat segera tertangani dengan cepat dan tepat.

CAMAT PEMALANG



SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671213 199803 1 005